

## **Eksistensi Gerakan Perempuan Islandia Berbasis Gender**

**Syahrudin<sup>1\*</sup>, Darul Lailatul Qomariyah<sup>2</sup>, Siti Marpuah<sup>3</sup>,  
Mohammad Ghozali<sup>4</sup>, Nur Kholis<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar, Ponorogo,  
Jawa Timur, 63471, INDONESIA

<sup>2</sup>Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, Jawa Timur, INDONESIA

<sup>3</sup>Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Parit Raja, Batu Pahat Johor, 86400  
MALAYSIA

<sup>4</sup> Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Mantren, Patihan Kidul, Siman 63471,  
Ponorogo, Jawa Timur, INDONESIA

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,  
Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur  
66221, INDONESIA

\*Corresponding Author Designation

DOI: <https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.02.006>

Received 18 September 2022; Accepted 2 Desember 2022; Available online 31 Desember 2022

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara mendalam Eksistensi Gerakan Perempuan Islandia Berbasis Gender yang memfokuskan terhadap 5 bidang utama yaitu Gerakan Ekonomi Islandia Berbasis Gender, bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pengajaran, perkawinan dan keluarga, kehidupan publik dan politik. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data diorganisasikan, dianalisis secara induktif, dan diklasifikasikan ke dalam banyak unit dan dirumuskan menjadi suatu pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Gerakan Perempuan Islandia Berbasis Gender cukup berhasil mengendalikan kondisi kesetaraan gender perempuan di Islandia. dengan beberapa tahun terakhir Islandia memiliki representasi politik perempuan tertinggi di dunia, Parlemen Islandia dipenuhi 38% perempuan dan 40% dalam kementerian, dalam jabatan senior, perempuan memegang sebanyak 42% posisi, dan 43% dalam anggota dewan perusahaan, banyak berdiri organisasi kaum perempuan, bertambahnya porsi perempuan dalam dunia kerja dan diakui oleh dunia, Gerakan kaum perempuan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan dalam negeri dan luar negeri dan Pada tahun 2022 Islandia dinobatkan sebagai negara paling setara gender, menduduki puncak Dunia serta pertama kali negara Islandia menjadi negara di dunia yang melarang perbedaan gaji berdasarkan gender. Namun secara umum dalam pencapaian tersebut banyak tantangan yang mereka hadapi. Untuk itu mereka tetap terus berjuang teguh

dengan pemikirannya dan ada upaya emansipasi untuk menginisiasi kebijakan yang peka terhadap isu gender dalam mengatasi permasalahan berbasis Gender secara terus menerus.

**Kata kunci:** *Eksistensi, Perempuan Islandia, Berbasis Gender*

## 1. Pengenalan

Kesetaraan gender mengarah pada keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Hari Perempuan Internasional menjadi momen bagi para perempuan di dunia dalam meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender. Gerakan ini diawali pada tanggal 8 Maret 1913 di Rusia. Para perempuan selama perang dunia I merayakan hari perempuan internasional sebagai protes perang secara damai, yang kemudian satu tahun selanjutnya perempuan di seluruh Eropa ikut melaksanakan aksi solidaritas pada tanggal yang sama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya tujuan dari gerakan kesetaraan gender semakin meluas dengan ditandai pecahnya Revolusi Rusia yang juga tidak lepas dari peran perempuan saat itu yang melakukan demonstrasi "Bread and Peace".

Pada pasca perang dunia ke-II, tanggal 8 Maret dijadikan sebagai hari advokasi terhadap kesetaraan perempuan. Pada tahun 1977 PBB meresmikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Jauh sebelum PBB meresmikan tanggal 8 Maret 1977 sebagai Hari Perempuan Internasional. Gerakan Asosiasi perempuan Islandia sudah ada, asosiasi tersebut di didirikan pada tahun 1869 di sebuah daerah kecil di bagian utara Islandia. Bahkan sebelum itu Pada tanggal 24 Oktober 1975, sekitar 90 persen perempuan di Islandia melakukan berunjuk rasa besar-besaran. Sekitar 25.000 perempuan menolak bekerja, memasak, dan mengasuh anak selama sehari dan menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. Lewat unjuk rasa bersejarah itu, perempuan dilihat dengan sudut pandang berbeda di Islandia dan membuat negara tersebut menjadi negara terdepan yang berjuang meraih kesetaraan gender dengan langkah pertama bagi emansipasi perempuan di Islandia.

Di Islandia terdapat warisan sejarah tentang perempuan-perempuan tangguh yang menginspirasi perempuan lainnya, merujuk terpilihnya preisdan perempuan pertama di dunia yang memenangkan pemilihan presiden islandia, yaitu Vigdis Finnbogadottir, tahun 1980. Islandia dinobatkan sebagai negara terdepan yang memberikan kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan.

Dengan warisan islandia sebagai presiden pertama terpilih didunia dan PBB meresmikan tanggal 8 Maret 1977 sebagai hari perempuan internasional, maka semakin kuat juga eksistensi pergerakan perempuan islandia di dunia global hal ini dibuktikan dengan beberapa keberanian pemerintah islandia untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang kesetaraan gender yang salah satunya adalah kebijakan cuti bagi orang tua di Islandia, meskipun kebijakan ini masih tidak dapat menyaingi negara Eropa. Perempuan Islandia menerima 68% dari gaji kotor mereka selama cuti hamil. Sementara di Norwegia, Swedia dan Prancis masing-masing sebesar 94%, 78%, dan 90%.

Selain itu Islandia sering dianggap sebagai gharda depan kesetaraan gender, meskipun begitu kaum perempuan islandia masih tetap terus berjuang untuk menjaga eksistensi hukum tentang kesetaraan gender, eksistensi Gerakan perempuan islandia adalah perjuangan untuk hak asasi manusia dan menuntut perubahan dalam budaya. Islandia juga telah mendapat peringkat sebagai pemimpin dunia dalam kesejahteraan gender selama bertahun-tahun. Islandia sering disebut sebagai negara model dalam hal pemberdayaan politik perempuan dan sebagai negara yang menghargai perempuan terutama dalam memberikan dukungan dan inspirasi baik dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan secara global masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan yang masih banyak

menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan disektor public.

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya.

Dari uraian diatas peneliti mencoba untuk menganalisis eksistensi Eksistensi Gerakan Perempuan Islandia Berbasis Gender dengan metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan bahan pustaka.

## 2. Metodologi

### 2.1 Bahan

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan bahan pustaka. Ini adalah teknik pengumpulan data dengan pemahaman data dari buku, teori, catatan, dan dokumen yang berkaitan erat dengan masalah. Perpustakaan umum atau khusus mengumpulkan sumber daya untuk proyek penelitian mendalam. Umumnya, perpustakaan penelitian akan berisi bahan ilmiah dan nonfiksi. Buku, majalah, jurnal, surat kabar, manuskrip, dan kaset secara tradisional disertakan. Ini telah berkembang dengan munculnya teknologi untuk memasukkan CD, DVD, Ebook, buku audio, dan katalog penelitian online

### 2.2 Kaedah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dengan jenis kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, tesis, skripsi, hand out, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang di kutip di dalam penulisan proposal. Sumber studi kepustakaan yang di gunakan oleh peneliti yaitu, jurnal penelitian, buku dan berita dari internet.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama* bahwa sumber data tidak didapat dari lapangan. Akan tetapi sumber data didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. *Kedua*, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan.

## 3. Hasil dan Perbincangan

### 3.1 Hasil

#### 1. Eksistensi Gerakan Perempuan Islandia Berbasis Gender

Gerakan Asosiasi perempuan pertama di Islandia didirikan pada tahun 1869 di sebuah daerah kecil di bagian utara Islandia. Pada tanggal 24 Oktober 1975, sekitar 90 persen perempuan di Islandia melakukan berunjuk rasa besar-besaran. Sekitar 25.000 perempuan menolak bekerja, memasak, dan mengasuh anak selama sehari dan menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. Lewat unjuk rasa bersejarah itu, perempuan dilihat dengan sudut pandang berbeda di Islandia dan membuat negara

tersebut menjadi negara terdepan yang berjuang meraih kesetaraan gender dengan langkah pertama bagi emansipasi perempuan di Islandia.

Pada tahun 2006 Indeks Kesenjangan Gender Global telah mengukur kemajuan dunia menuju kesetaraan gender di empat dimensi utama: Partisipasi dan Peluang Ekonomi, Pencapaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik. Di tingkat global, hanya 68,1% kesenjangan gender yang telah ditutup, yang berarti perlu 132 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan gender. Ini sedikit peningkatan dari tahun lalu, tetapi tiga dekade lebih lama dari situasi pada tahun 2020, sebelum dampak COVID-19 pada kesetaraan gender.

Selama 3 tahun terakhir ini, Islandia telah menduduki peringkat teratas di Global Gender Gap Index. Hal ini diraih berdasarkan hasil yang baik dalam hal Gerakan pemberdayaan politik dan pencapaian pendidikan dan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, berikut beberapa laporan data menurut Economic Forum Gender Gap tahun 2020 hingga 2022:

Peringkat Indeks Kesenjangan Gender Global menilai semua 156 negara dengan Islandia diakui sebagai negara dengan kesetaraan gender paling banyak untuk ke-11 kalinya. Secara geografis, daftar 10 besar negara dengan kesetaraan gender didominasi oleh negara-negara Nordik dengan Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia berada di lima besar. 10 negara teratas menurut peringkat global adalah sebagai berikut:

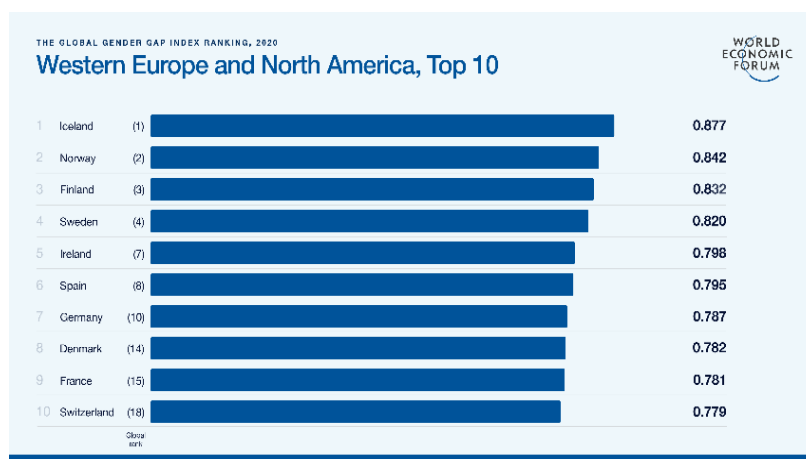


Figure 1: Source: World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020

Peringkat Kesenjangan Gender Global 2020, Semua lima negara teratas telah menutup setidaknya 80% dari kesenjangan mereka, dan pemain terbaik (Islandia) telah menutup 82% dari kesenjangan sejauh ini Sepuluh besar global menampilkan empat negara Nordik Iceland 1st, Norway 2nd, Finland 3rd, Sweden 4th.

Pada peringkat Indeks Kesenjangan Gender Global menilai semua 156 negara dengan Islandia diakui sebagai negara dengan kesetaraan gender paling banyak untuk ke-12 kalinya. Secara geografis, daftar 10 besar negara dengan kesetaraan gender didominasi oleh negara-negara Nordik dengan Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia berada di lima besar. 10 negara teratas menurut peringkat global adalah sebagai berikut:



Figure 2: Source: World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2021

Secara global islandia, jarak rata-rata yang diselesaikan hingga paritas adalah 68% dalam laporan tahun 2021, sedikit mundur dibandingkan tahun 2020 - dengan kesenjangan melebar sebesar 0,6 poin persentase. Itu berarti pada lintasan saat ini, dibutuhkan 135,6 tahun untuk menutup kesenjangan di seluruh dunia.

Rank	Country	Score		Rank change	Score change	
		0-1	2020		2020	2006
1	Iceland	0,892	0,892	-	+0,016	+0,111
2	Finland	0,861	0,861	1	+0,029	+0,065
3	Norway	0,849	0,849	-1	+0,007	+0,050
4	New Zealand	0,840	0,840	2	+0,011	+0,089
5	Sweden	0,823	0,823	-1	+0,003	+0,009
6	Namibia	0,809	0,809	6	+0,025	+0,122
7	Rwanda	0,805	0,805	2	+0,014	n/a
8	Lithuania	0,804	0,804	25	+0,059	+0,096
9	Ireland	0,800	0,800	-2	+0,002	+0,066
10	Switzerland	0,799	0,799	8	+0,019	+0,098
11	Germany	0,796	0,796	-1	+0,010	+0,044
12	Nicaragua	0,796	0,796	-7	-0,008	+0,139
13	Belgium	0,789	0,789	14	+0,039	+0,081
14	Spain	0,788	0,788	-6	-0,006	+0,056
15	Costa Rica	0,786	0,786	-2	+0,003	+0,092
16	France	0,784	0,784	-1	+0,003	+0,132
17	Philippines	0,784	0,784	-1	+0,003	+0,032
18	South Africa	0,781	0,781	-1	+0,001	+0,068
19	Serbia	0,760	0,760	20	+0,044	n/a
20	Latvia	0,778	0,778	-9	-0,007	+0,069
21	Austria	0,777	0,777	13	+0,033	+0,078
22	Portugal	0,775	0,775	19	+0,031	+0,083
23	United Kingdom	0,775	0,775	-2	+0,008	+0,038
24	Canada	0,772	0,772	-5	+0,001	+0,056
25	Albania	0,770	0,770	-5	+0,001	+0,109
26	Burundi	0,769	0,769	6	+0,004	n/a
27	Barbados	0,769	0,769	1	+0,019	n/a
28	Moldova	0,768	0,768	-6	+0,011	+0,055
29	Denmark	0,768	0,768	-15	-0,014	+0,022
30	United States	0,763	0,763	23	+0,039	+0,059
31	Netherlands	0,762	0,762	7	+0,026	+0,037
32	Mozambique	0,758	0,758	24	+0,035	n/a
33	Belarus	0,758	0,758	-4	+0,012	n/a
34	Mexico	0,757	0,757	-9	+0,003	+0,111
35	Argentina	0,752	0,752	-5	+0,005	+0,069
36	Lao PDR	0,750	0,750	7	+0,019	n/a
37	Tinidad and Tobago	0,749	0,749	-13	-0,007	+0,069
38	Bulgaria	0,746	0,746	11	+0,019	+0,059
39	Cuba	0,746	0,746	-8	+0,000	n/a
40	Jamaica	0,741	0,741	1	+0,006	+0,040
41	Slovenia	0,741	0,741	-5	-0,002	+0,066
42	Ecuador	0,739	0,739	6	+0,011	+0,096
43	El Salvador	0,738	0,738	37	+0,032	+0,055
44	Panama	0,737	0,737	2	+0,007	+0,044
45	Croatia	0,733	0,733	15	+0,013	+0,019
46	Estonia	0,733	0,733	-20	-0,019	+0,038
47	Zimbabwe	0,732	0,732	-	+0,002	+0,066
48	Montenegro	0,732	0,732	23	+0,021	n/a
49	Georgia	0,732	0,732	25	+0,024	+0,061
50	Australia	0,731	0,731	-6	+0,000	+0,015
51	Suriname	0,729	0,729	26	+0,023	n/a
52	Eswatini	0,729	0,729	31	+0,025	+0,069
53	Guyana*	0,728	0,728	n/a	n/a	n/a
54	Singapore	0,727	0,727	-	+0,004	+0,072
55	Luxembourg	0,726	0,726	-4	+0,001	+0,059
56	Zambia	0,726	0,726	-11	-0,005	+0,090
57	Madagascar	0,725	0,725	5	+0,007	+0,087
58	Bahamas	0,725	0,725	3	+0,005	n/a
59	Colombia	0,725	0,725	-37	-0,034	+0,020
60	Israel	0,724	0,724	4	+0,006	+0,035
61	Bolivia	0,722	0,722	-19	-0,012	+0,089
62	P eru	0,721	0,721	4	+0,007	+0,059
63	Italy	0,721	0,721	13	+0,014	+0,075
64	Timor-Leste	0,720	0,720	53	+0,058	n/a
65	Bangladesh	0,719	0,719	-15	-0,006	+0,090
66	Liganda	0,717	0,717	-1	-0,000	+0,037
67	Honduras	0,716	0,716	-9	-0,006	+0,068
68	Cape Verde	0,716	0,716	-16	-0,009	n/a
69	Mongolia	0,716	0,716	10	+0,010	+0,034
70	Chile	0,716	0,716	-15	-0,007	+0,070
71	Botswana	0,716	0,716	2	+0,006	+0,026
72	United Arab Emirates	0,716	0,716	48	+0,060	+0,124
73	North Macedonia	0,715	0,715	-3	+0,004	+0,017
74	Ukraine	0,714	0,714	-15	-0,007	+0,034
75	Poland	0,713	0,713	-35	-0,023	+0,033
76	Bosnia and Herzegovina	0,713	0,713	-7	+0,001	n/a
77	Slovak Republic	0,712	0,712	-14	-0,007	+0,036
78	Czech Republic	0,711	0,711	-	+0,004	+0,039
79	Thailand	0,710	0,710	-4	+0,003	+0,027
80	Kazakhstan	0,710	0,710	-8	-0,001	+0,017
81	Russian Federation	0,708	0,708	-	+0,002	+0,031
82	Tanzania	0,707	0,707	-14	-0,006	+0,004
83	Cyprus	0,707	0,707	8	+0,015	+0,064
84	Malta	0,703	0,703	6	+0,010	+0,051
85	Uruguay	0,702	0,702	-48	-0,035	+0,047
86	Paraguay	0,702	0,702	14	+0,019	+0,046
87	Viet Nam	0,701	0,701	-	+0,002	n/a
88	Romania	0,700	0,700	-33	-0,024	+0,020
89	Dominican Republic	0,699	0,699	-3	-0,001	+0,035
90	Belize	0,699	0,699	20	+0,028	n/a
91	Venezuela	0,699	0,699	-24	-0,014	+0,032
92	Lesotho	0,698	0,698	-4	+0,003	+0,017
93	Brazil	0,695	0,695	-1	+0,004	+0,041
94	Liberia	0,693	0,693	3	+0,008	n/a
95	Kenya	0,692	0,692	14	+0,021	+0,044
96	Cameroon	0,692	0,692	-	+0,006	+0,105
97	Ethiopia	0,691	0,691	-15	-0,015	+0,096
98	Ghana	0,689	0,689	-14	-0,012	+0,035
99	Hungary	0,688	0,688	6	+0,011	+0,019
100	Azerbaijan	0,688	0,688	-6	+0,001	n/a
101	Indonesia	0,688	0,688	-16	-0,013	+0,034
102	Korea, Rep.	0,687	0,687	6	+0,016	+0,071
103	Cambodia	0,684	0,684	-14	-0,010	+0,055
104	Senegal	0,684	0,684	-5	-0,000	n/a
105	Togo	0,683	0,683	35	+0,068	n/a
106	Nepal	0,683	0,683	-5	+0,003	+0,135
107	China	0,682	0,682	-1	+0,006	+0,026
108	Kyrgyz Republic	0,681	0,681	-15	-0,007	+0,007
109	Myanmar	0,681	0,681	5	+0,016	n/a
110	Mauritius	0,679	0,679	5	+0,014	+0,046
111	Brunei Darussalam	0,678	0,678	-16	-0,009	n/a
112	Malaysia	0,678	0,678	-8	-0,001	+0,026
113	Fiji	0,674	0,674	-10	-0,003	n/a
114	Armenia	0,673	0,673	-16	-0,011	n/a
115	Malawi	0,671	0,671	1	+0,007	+0,027
116	Sri Lanka	0,670	0,670	-14	-0,009	-0,050
117	Ghana	0,666	0,666	-10	-0,007	+0,000
118	Guinea	0,660	0,660	7	+0,018	n/a
119	Angola	0,657	0,657	-1	-0,004	+0,053
120	Japan	0,656	0,656	1	+0,003	+0,011
121	Sierra Leone	0,655	0,655	-10	-0,012	n/a
122	Guatemala	0,655	0,655	-9	-0,011	+0,049
123	Benin	0,653	0,653	-4	-0,004	+0,075
124	Burkina Faso	0,651	0,651	5	+0,016	+0,066
125	Tajikistan	0,650	0,650	12	+0,024	n/a
126	Tunisia	0,649	0,649	-2	+0,005	+0,020
127	Gambia, The	0,644	0,644	9	+0,016	-0,000
128	Maldives	0,642	0,642	-5	-0,004	n/a
129	Egypt	0,639	0,639	5	+0,010	+0,061
130	Bhutan	0,639	0,639	1	+0,004	n/a
131	Jordan	0,638	0,638	7	+0,015	+0,027
132	Lebanon	0,638	0,638	13	+0,038	n/a
133	Turkey	0,638	0,638	-3	+0,003	+0,053
134	Côte d'Ivoire	0,637	0,637	8	+0,030	n/a
135	Papua New Guinea	0,635	0,635	-8	-0,001	n/a
136	Algeria	0,633	0,633	-4	-0,001	+0,031
137	Bahrain	0,632	0,632	-4	+0,003	+0,043
138	Niger*	0,629	0,629	n/a	n/a	n/a
139	Nigeria	0,627	0,627	-11	-0,008	+0,016
140	India	0,625	0,625	-28	-0,042	+0,024
141	Vanuatu	0,625	0,625	-15	-0,013	n/a
142	Qatar	0,624	0,624	-7	-0,005	n/a
143	Kuwait	0,621	0,621	-21	-0,029	-0,013
144	Morocco	0,612	0,612	-1	+0,008	+0,030
145	Oman	0,608	0,608	-1	+0,006	n/a
146	Mauritania	0,606	0,606	-5	-0,008	+0,022
147	Saudi Arabia	0,603	0,603	-1	+0,003	+0,079
148	Chad	0,593	0,593	-1	-0,003	+0,068
149	Mali	0,591	0,591	-10	-0,030	-0,009
150	Ivan, Islamic Rep.	0,582	0,582	-2	-0,002	+0,002
151	Congo, Democratic Rep.	0,576	0,576	-2	-0,002	n/a
152	Syria	0,568	0,568	-2	+0,001	n/a
153	Pakistan	0,556	0,556	-2	-0,007	+0,013
154	Iraq	0,535	0,535	-2	+0,005	n/a
155	Yemen	0,492	0,492	-2	-0,002	+0,032
156	Afghanistan*	0,444	0,444	n/a	n/a	n/a

Gambar 3. The Global Gender Gap tahun 2021

Hasil Global Skor Kesenjangan Gender Global (berdasarkan rata-rata tertimbang populasi untuk masing-masing dari 156 negara yang termasuk tahun ini) pada tahun 2021 adalah 67,7% (bila mempertimbangkan hanya 107 ekonomi yang tercakup terus menerus dari tahun 2006 hingga 2021 adalah 68,0%). Ini berarti bahwa gap yang tersisa untuk ditutup adalah sebesar 32,3%. Rata-rata, kesenjangan telah melebar hampir 0,6 poin persentase dibandingkan dengan edisi indeks sebelumnya.

Melebarnya kesenjangan gender global secara keseluruhan ini juga tercermin dalam fakta bahwa jumlah ekonomi yang mencatat setidaknya peningkatan marjinal lebih kecil daripada jumlah ekonomi yang mencetak kinerja lebih lemah dari tahun lalu. Dari 153 ekonomi dan ekonomi yang tercakup baik tahun ini maupun pada tahun 2020, 98 telah meningkatkan skor mereka sementara 55 telah mengalami kemunduran atau terhenti.

Figure 3. The Global Gender Gap tahun 2021 menyajikan peringkat Kesenjangan Gender Global 2021 dan skor untuk semua 156 negara yang tercakup dalam laporan tahun ini. Meskipun belum ada ekonomi yang mencapai kesetaraan gender penuh, dua ekonomi teratas (Islandia dan Finlandia) telah menutup setidaknya 85% dari kesenjangan mereka, dan tujuh ekonomi lainnya (Lithuania, Namibia, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Rwanda, dan Irlandia) telah menutup setidaknya 80% dari kesenjangan mereka. Secara geografis, 10 besar dunia terus didominasi oleh ekonomi Nordik, dengan —Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia—di lima besar. 10 besar diselesaikan oleh satu ekonomi dari Asia Pasifik (Selandia Baru ke-4), dua ekonomi Sub-Sahara (Namibia, ke-6 dan Rwanda, ke-7), satu ekonomi dari Eropa Timur (pendatang baru ke 10 besar, Lithuania, ke-8) dan dua ekonomi Eropa Barat lainnya (Irlandia, 9, dan Swiss, 10, ekonomi lain di 10 teratas untuk pertama kalinya).

Lima ekonomi, meskipun dimulai dari tingkat kesetaraan gender yang berbeda, telah meningkatkan skor mereka setidaknya 4,4 poin persentase atau lebih, memenuhi syarat sebagai lima ekonomi paling baik tahun ini: Lituania, Serbia, Timor-Leste, Togo, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun ini Islandia dinobatkan sebagai negara paling setara gender, menduduki puncak Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2022. Hal ini ditunjukkan dalam Global Gender Gap Index tahun 2022:

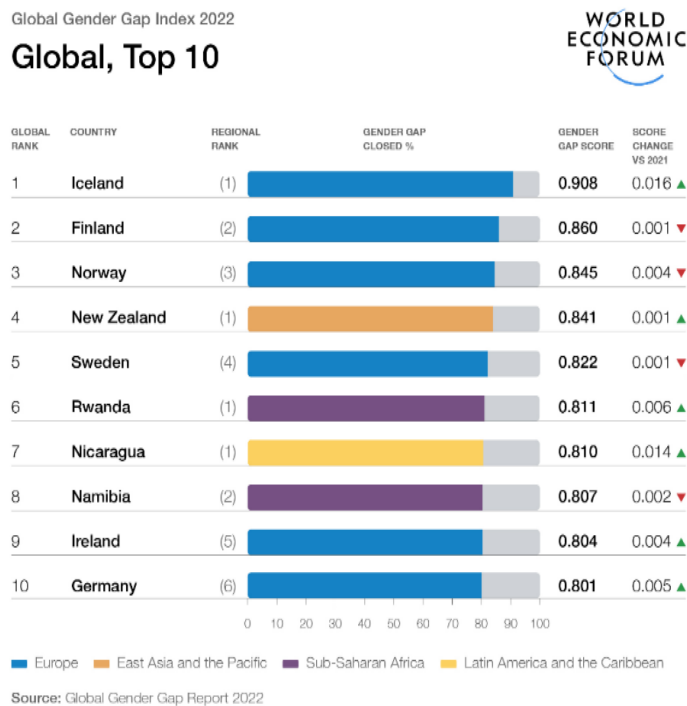


Figure 4: The Global Gender Gap tahun 2022

Data diatas menunjukkan bahwa eksistensi gerakan Islandia hampir sepenuhnya menutup kesenjangan gender dalam Pencapaian Pendidikan, dengan skor 0,993, di mana 1 berarti kesetaraan telah tercapai. Sementara hanya 22% dari kesenjangan gender global dalam Pemberdayaan Politik telah ditutup, Islandia menduduki puncak seluruh Indeks dalam dimensi ini, karena memiliki bagian yang lebih tinggi dari perempuan sebagai kepala negara selama 50 tahun terakhir dan bagian yang lebih tinggi dari perempuan di parlemen daripada negara lain.

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi Gerakan kaum perempuan islandia mempunyai pengaruh besar terhadap kesetaraan gender secara global, terbukti 5 tahun terakhir Islandia menduduki ranking pertama dari 10 negara.

## 2. Kesenjangan Upah Berbasis Gender di Islandia

a. Gerakan Ekonomi Islandia Berbasis Gender

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

Berdasarkan data Uni Eropa, Islandia adalah negara terdepan yang mengikutsertakan perempuan ke lapangan pekerjaan, dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 80%. Indikator itu tidak hanya menempatkan Islandia di atas negara-negara yang sebanding, tapi juga lebih tinggi daripada seluruh negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sejak 1970, semakin banyak perempuan Islandia terjun ke lapangan pekerjaan dan terus berada di dalamnya pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi itu merupakan efek dari sejumlah kebijakan politik, antara lain hak hukum bagi orang tua untuk kembali ke pekerjaan setelah kelahiran anak mereka.

Guru besar studi gender di Universitas Islandia, Thorgerdur Einarsdóttir, menyebut pergerakan perempuan dan tekanan kelompok feminis yang masif berada di balik kemauan politik Islandia tersebut. Negara itu menerapkan beberapa hal radikal di isu gender, antara lain cuti ayah usai kelahiran anak dan kuota per jenis kelamin untuk pekerjaan tertentu. Einarsdóttir yakin, budaya yang berkembang di Islandia juga mempengaruhi capaian positif negara itu di urusan gender.

Berkaitan dengan hak perempuan islandia di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apa pun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

b. Hak dalam bidang Kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan.



Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 yang kini memasuki tahun ke-14, membandingkan 153 negara dalam hal kemajuannya menciptakan kesetaraan gender. Kesetaraan ini berdasarkan empat kategori antara lain partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik.

c. Hak yang sama dalam Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi, dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Seperti salah satu poin perjuangan Kaum Perempuan Islandia, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

d. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

e. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain:

- 1) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;
- 2) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan
- 3) Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Perempuan adalah warganegara yang mempunyai hak politik sebagaimana laki-laki. Data menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik sangat kecil khususnya di Legislatif. Hal ini disebabkan karena diskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan itu menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Oleh sebab itu pentingnya perjuangan untuk terus mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik dengan menggunakan prinsip “tindakan khusus sementara”. Tindakan khusus ini dapat dilihat dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan

keterwakilan dalam posisi strategis pada kekuasaan, partisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan, dan sinergitas.

### 3.2 Perbincangan

Produk penelitian kebijakan pendidikan merupakan sumber informasi utama dalam Paritas gender belum pulih, menurut Laporan Kesenjangan Gender Global 2022. Perlu 132 tahun lagi untuk menutup kesenjangan gender global. Ketika krisis semakin parah, hasil kerja perempuan menderita dan risiko kemunduran kesetaraan gender global semakin meningkat.

Pembagian yang adil dari pekerjaan yang tidak dibayar telah berperan penting bagi kemajuan Islandia, Joeli Brearley, penulis *The Motherhood Penalty*, mengatakan kepada Forum Ekonomi Dunia: “Ketika 90% wanita melakukan pemogokan karena ini pada tahun 1970-an, itu menunjukkan bahwa pria ada nilai dalam pekerjaan ini, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa itu. Itu adalah perubahan besar bagi Islandia dalam hal kesetaraan gender. Sejak tahun 1970, banyak perempuan Islandia terjun ke lapangan pekerjaan dan terus berada di dalamnya pada tahun-tahun berikutnya dan memainkan peran serupa pekerja laki-laki hingga mampu menambah US\$28 triliun pada GDP tahunan global, menurut perhitungan perusahaan konsultan ekonomi (McKinsey 2018). Pada 24 Oktober 1975, sekitar 90 persen perempuan di Islandia turun ke jalan dan berunjuk rasa menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. (Women's History Archives).

Kemudian pada tahun 1980 Islandia mempunyai warisan sejarah tentang terpilihnya presiden perempuan pertama di dunia yaitu Vigdis Finnbogadottir. Selain itu Islandia memiliki pemimpin perempuan selama 22 tahun dari 50 tahun terakhir. Parlemen Islandia setidaknya dipenuhi 38% perempuan dan 40% dalam kementerian. Selain itu, dalam jabatan senior, perempuan memegang sebanyak 42% posisi, dan 43% dalam anggota dewan perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan mayoritas kaum perempuan semakin kuat. Yang berawal dari tidak adanya keadilan kaum perempuan islandia tentang upah bagi mereka dan laki-laki. Sehingga Pada 2017 terwujud Islandia menjadi negara di dunia yang melarang pembedaan gaji berdasarkan gender. Dilansir dari Independent, undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut berlaku mulai Januari 2018, kemudian pada tanggal 19 Februari 2018 Islandia mengeluarkan larangan bagi pemberi kerja untuk membayar upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki. (Angela Henshall BBC Capital 2018). Hal ini berdampak positif terhadap budaya masyarakat setempat.

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan yang masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan disektor public.

Gerakan kaum perempuan islandia tentang Tentang Kesenjangan Upah Berbasis Gender terusik lagi oleh Dampak pandemi covid-19 dan kian memperlebar kesenjangan gender. Hal ini membuat kaum perempuan mesti menunggu lama lagi agar ada kesetaraan gender. Demikian Laporan Kesenjangan Gender Global 2021 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia, hingga negara islandia menduduki ranking teratas:

### Gender Gap Index 2021 rankings

The Geneva-based World Economic Forum's annual report tracks disparities between the sexes in in four areas: education, health, economic opportunity and political empowerment

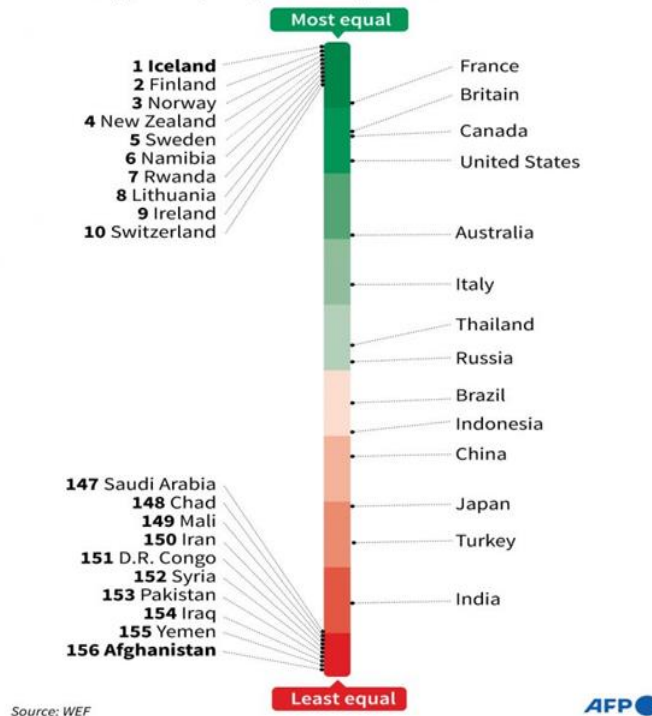


Figure 4: The Global Gender Gap tahun 2021

Sumber: <https://mediaindonesia.com/weekend/394904/pandemi-covid-19-kian-memicu-kesenjangan-gender>

Menurut data tersebut, meskipun dampak pandemi covid-19 terus dirasakan secara global, dan untuk menutup kesenjangan gender global telah meningkat satu generasi dari 99,5 tahun menjadi 135,6 tahun. Kemajuan menuju kesetaraan gender terhenti di beberapa sektor ekonomi dan industri besar. Ini sebagian karena perempuan lebih sering bekerja di sektor-sektor yang paling terpukul oleh penguncian (lockdown) islandia tetap menduduki ranking pertama pada kesetaraan gender.

Meskipun beban mereka semakin bertambah di rumah dengan adanya penutupan sekolah. Laporan tersebut, yang kini memasuki tahun ke-15, menjadi tolok ukur evolusi kesenjangan berbasis gender di empat bidang, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Laporan ini juga mengkaji pendorong kesenjangan gender dan menguraikan kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk pemulihan inklusif gender.

Di sisi lain konsep hak-hak dasar perempuan paling tidak mempunyai dua makna tersembunyi di dalamnya. Makna pertama, hak asasi perempuan sekadar pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat belaka. Makna kedua, hak asasi manusia dipahami di dalam konotasi sebagai konsep yang lebih revolusioner, yang di dalamnya terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.

Konvensi HAM yang diatur dan disepakati di dunia internasional di antaranya adalah risalah pasal-pasal tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita, yaitu:

- a. Mengenai pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya penegakan terhadap perempuan dan upaya menegakkan hak asasi persamaan hak dan kewajiban dalam undang-undang dasar nasional;

- b. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya;
- c. penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi;
- d. Mengenai kewajiban negara-negara peserta memberikan persamaan hak wanita di muka hukum, penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan;
- e. Mengenai pembentukan panitia Internasional untuk menilai kemajuan implementasi, dengan pangkal pertimbangan geografis yang tepat dan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia system hukum utama, panitia dipilih untuk masa jabatan 4 tahun;
- f. Konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi antara perempuan dan pria yang mungkin terdapat dengan perundang-undangan di suatu negara. Di samping itu konvensi ini tidak bersifat kaku. Setiap negara berhak untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi- asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena ia adalah “perempuan” atau yang disebut “ideologi gender.” Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, individu, kelembagaan, dan sistem. Sebagai contoh, kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu.

Bahwa perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan yang didasarkan pada pilihan, dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain. Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender.

#### **4. Rumusan**

Dari hasil dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dengan jenis kajian kepustakaan. maka dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan di negara-negara di dunia saling memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan, khususnya kaum perempuan islandia. Perjuangan Gerakan ini bertujuan agar perempuan tidak diperlakukan semena-mena dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam masyarakat khususnya dunia kerja. Di Islandia perempuan yang mendedikasikan dirinya sebagai penggerak kesetaraan gender perempuan. adapun strategi-strategi Gerakan kaum perempuan Islandia memfokuskan terhadap 5 bidang utama yaitu Gerakan Ekonomi Islandia Berbasis Gender, bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pengajaran, perkawinan dan keluarga, kehidupan publik dan politik. Selain itu Islandia juga membentuk strategi melalui kerjasama pembangunan Islandia (International Development Cooperation) yang fokus memerangi kemiskinan dan kelaparan, serta menyoroti hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, perdamaian dan keamanan. Strategi ini mencakup kerjasama multilateral dan bilateral, bantuan kemanusiaan dan upaya perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan mayoritas kaum perempuan semakin kuat. Dan terbukti kesuksesan Gerakan kaum perempuan berdasarkan data Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2022, Pada tahun 2022 Islandia dinobatkan sebagai negara paling setara gender, menduduki puncak Dunia. Dan pertama kali negara Islandia menjadi negara di dunia yang melarang perbedaan gaji berdasarkan gender.

Namun dalam pencapaian tersebut banyak tantangan yang mereka hadapi tetapi mereka tetap berjuang teguh dengan pemikirannya. Oleh karena itu, lambat laun banyak organisasi kaum perempuan yang berdiri dan semakin bertambahnya porsi perempuan dalam dunia kerja dan diakui oleh dunia. Beberapa tahun terakhir Islandia memiliki representasi politik perempuan tertinggi di dunia, Parlemen Islandia dipenuhi 38% perempuan dan 40% dalam kementerian. Selain itu, dalam jabatan senior, perempuan memegang sebanyak 42% posisi, dan 43% dalam anggota dewan perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan dalam negeri dan luar negeri.

**Kebijakan dalam negeri:** Pada tahun 1975, Islandia sudah membuat Undang-Undang tentang Kesamaan Status dan Persamaan Hak Perempuan dan Laki-Laki No. 10/2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 162/2010 dan No. 126/2011 yaitu *The Act on Equal Status and Equal Rights of Women and Men*. Undang-undang ini kemudian mengalami 4 kali amandemen yaitu pada tahun 1985, 1991, 2000, 2008, 2010 dan terakhir tahun 2011.

**Kebijakan luar negeri:** Tepat pada tahun 2008, Islandia mengadopsi *National Action Plan* sebagai implementasi dari *UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security*. Resolusi ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik secara damai dan pemerintah Islandia memutuskan untuk fokus terhadap rekonstruksi pasca konflik dan akses bagi perempuan untuk terlibat dalam negosiasi perdamaian di negara-negara konflik.

### **Penghargaan**

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo atas restu dan dukungannya. Berkat Dana hibah Penelitian nomor 20-IAIRM-2022 dari Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo, Indonesia, penelitian ini dapat diselesaikan. Puslitbang Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo dan seluruh pimpinan jajaran rektorat, dekanat, biro dan ketua lembaga penulis sampaikan terima kasih.

### **Rujukan**

- [1] Anna, L. K. (2019) 10 Negara dengan Kesetaraan Gender Terbaik, Kompas.com. Available at: <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/12/22/110700320/10-negara-dengan-kesetaraan-gender-terbaik> (Accessed: 8 November 2021).
- [2] Dewi, B. K. (2020) Hari Perempuan Internasional, Seruan Kesetaraan Gender dan Hak Asasi, Kompas.com. Available at: <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/03/08/234219220/hari-perempuan-internasional-seruan-kesetaraan-gender-dan-hak-asasi?page=all#page2> (Accessed: 8 November 2021).
- [3] Ministry of social affairs and social security (no date) 'Gender Equality in Iceland'. Available at: <https://www.iceland.is/press/press-media-kit/gender-equality-in-iceland/>.
- [4] Kristjansson, Jakob Thor and Margret Cela. 2011. Centre For Small State Studies Publication Series. University of Iceland. Working Paper 1-2011
- [5] Marsh, David & Stoker, Gerry. 2010. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Bandung: Nusa Media)
- [6] Marsh, David & Stoker, Gerry. 2010. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Bandung: Nusa Media) 0DV·XGL0DVGDU) 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan,)

- [7] zed. Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan .(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)
- [8] Tickner, J. Ann. 1992. Gender in International Relations: Feminist Perspectives in Achieving Global Security. (Columbia University Press,)
- [9] Ari Yusrini, tenaga kerja perempuan, jurnal Al-maiyyah, 10 No.1(2018) 115-131
- [10] Mely, G. Tan. 1991. Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- [11] Arivia, 2006. Gadis, Feminisme Sebuah Kata Hati. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Stykarsdottir, 2010. The Policy In Gender Equality in Iceland, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament Aripurnami et all,
- [12] Sita,2013. , Making Democracy Gender Responsive. Women Research Institute Susan,Blackburn, 2007.
- [13] Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang.(Yayasan Obor Indonesia Dean E mundy. "Framing Saint Johanna: Media Coverage
- [14] Sitepu Antonius, 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu Lovendusky. State Feminism and Political Representation. (NY:Cambridge University Press, 2005)
- [15] International Development Agency, Ministry for (2013)
- [16] Kowani. 2009. Derap Langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia,Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan McCann et all. Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives. Routledge, 2003.
- [17] Ridjal et all, Fauzie, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993. Roces, Mina and Louise Edwards Feminism and Transnational Activism. London and New York: Routledge, 2010.
- [18] [https://republika.co.id/berita/po\\_0x5h335/peran-perempuandi-dunia-kerja-semakinpenting-di-akses-pada-tanggal-04-Juni-2020](https://republika.co.id/berita/po_0x5h335/peran-perempuandi-dunia-kerja-semakinpenting-di-akses-pada-tanggal-04-Juni-2020), 12.32
- [19] <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180309180650-33-6793/para-perempuanini-posisi-wanita-dalamekonomi-indonesia> di akses pada tanggal 05 Juni 2020, 08.43  
<https://tirtoid./hariperempuansedunia-kuatnya-sejarahemansipasi-di-islandia-diTZ> di akses pada tanggal 05 Juni 2020
- [20] <https://economy.okezone.com/read/2019/12/18/320/2143489/islandia-jadi-negara-dengan-kesetaraan-gender-terbaik>
- [21] <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-43102773>
- [22] <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/89082/global-gender-gap>